

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Implementasi Good Government Governance

2.1.1.1 Pengertian Good Government Governance

Mardiasmo (22:2018) mendefinisikan *Good Governance* adalah “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nations’s affair at all levels*”. Kutipan ini dapat diartikan bahwa *Good Governane* lebih menekankan aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan keuangan negara.

Pengertian *Good Goverment Governance* Menurut Hendra Karianga (2017:40), yaitu: “*Good Governace* Sektor Publik Diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik dengan melibatkan stakeholder terhadap berbagai macam kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan berbagai macam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi dan transparansi”. *Good Governance* dapat dipahami sebagai implementasi otoritas politik, ekonomi, dan adminstratif dalam proses manajemen berbagai urusan public pada berbagai level dalam suatu negara. (Wiratno, 2021:1). Jadi, dapat disimpulkan bahwa *Good Government* merupakan sistem pengelolaan keuangan negara yang melibatkan aspek politik, ekonomi, dan Administratif. Konsep ini menekankan partisipasi aktif para pemangku kepentingan dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial politik, dan pemanfaatan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat. Penerapan *Good Goverments* didasari oleh prinsip-prinsip keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, dan transparansi, yang bertujuan untuk

menjalankan pemerintahan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

2.1.1.2 Karakteristik Good Governance

Mardiasmo (23:2018) memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *Good Governance*, 9f meliputi:

1. *Participation*

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

2. *Rule of law*

Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

3. *Transparency*

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

4. *Responsiveness*

Lembaga-lembaga public harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder.

5. *Consensus orientation*

Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

6. *Equity*

Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

7. *Efficiency and Effectiveness*

Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisiensi) dan berhasil guna (efektif).

8. *Accountability*

Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

9. *Strategic vision*

Penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

2.1.2 Kompetensi Staf Akuntansi

2.1.2.1 Kompetensi

2.1.2.1.1 Pengertian Kompetensi

Kompetensi merupakan salah satu komponen penting yang harus dimiliki individu agar pelaksanaan tugas pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Menurut Sutrisno & Zuhri (2019) mendefinisikan kompetensi sebagai suatu kemampuan yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan yang didukung oleh sikap kerja serta penerapannya dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan di tempat kerja yang mengacu pada persyaratan kerja yang ditetapkan.

Rusvitawati, Sugianti, & Dewi (2019) menjelaskan bahwa kompetensi terdiri dari sejumlah perilaku kunci yang dibutuhkan untuk melaksanakan peran tertentu untuk menghasilkan prestasi atau kinerja yang memuaskan. Jadi, kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan yang didukung oleh pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, dan penerapannya dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan persyaratan kerja. Kompetensi juga mencakup sejumlah perilaku kunci yang diperlukan untuk menjalankan peran tertentu dan mencapai kinerja yang memuaskan. Dengan demikian, kompetensi menjadi unsur penting yang harus dimiliki individu untuk menjalankan tugas pekerjaan dengan baik.

2.1.2.2 Staf

2.1.2.2.1 Pengertian Staf

Menurut KBBI staf adalah sekelompok orang yang bekerja sama membantu seorang ketua dalam mengelola sesuatu. Zakaria (2019) mengemukakan bahwa staf dapat diartikan sebagai unsur pembantu pimpinan yang melakukan sebagian pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pimpinan untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam edisi terbaru (2020) bukunya "Management," Richard L. Daft menjelaskan bahwa staf adalah personel yang memberikan dukungan dan keahlian khusus dalam berbagai bidang seperti sumber daya manusia, teknologi informasi, keuangan, dan logistik. Staf dalam konteks modern juga mencakup peran yang berfokus pada inovasi, kolaborasi lintas fungsi, dan pengembangan berkelanjutan.

staf dapat disimpulkan sebagai kelompok individu yang bekerja sama dalam mendukung pimpinan atau manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Mereka bertindak sebagai unsur pendukung dengan menyediakan keahlian khusus

di berbagai bidang seperti sumber daya manusia, teknologi informasi, keuangan, dan logistik. Dalam konteks modern, peran staf juga mencakup inovasi, kolaborasi lintas fungsi, dan pengembangan berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas organisasi.

2.1.2.3 Akuntansi

2.1.2.3.1 Pengertian Akuntansi

Menurut Thomas Sumarsan (2020 : 1) menjelaskan bahwa Akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Winwin yadianti, Ilham Wahyudin (2020 : 6-7) Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan.

Menurut (Priharto, 2020) mengatakan bahwa Akuntansi adalah seni untuk mencatat , meringkas, menganalisis, dan melaporkan data yang berkaitan dengan transaksi keuangan dalam bisnis atau perusahaan.

Pemahaman berasal dari kata paham yang mempunyai arti pandai atau mengerti benar, sedangkan pemahaman merupakan proses, perbuatan memahami atau memahamkan. Orang yang memiliki pemahaman akuntansi adalah orang yang pandai dan mengerti benar mengenai akuntansi (Wayan dan Sri, 2020). Sedangkan menurut American Institute of Certified Public Accounting (AICPA) dalam Sri (2020:7) akuntansi merupakan seni pencatatan, pengikhtisaran dengan cara tertentu

dalam ukuran moneter dari transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang bersifat keuangan beserta menafsirkan hasil-hasilnya.

akuntansi dapat dipahami sebagai suatu seni dan sistem informasi yang melibatkan proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, dan analisis transaksi keuangan serta kejadian ekonomi dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan akurat, yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan. Pemahaman akuntansi mengharuskan seseorang untuk memiliki kemampuan dan pengetahuan mendalam tentang proses ini, sehingga dapat menafsirkan dan memahami informasi keuangan dengan benar.

2.1.2.4 Kompetensi Staf Akuntansi

2.1.2.4.1 Pengertian Kompetensi Staf Akuntansi

Menurut The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) pada tahun 2021, kompetensi staf akuntansi mencakup pengetahuan teknis, keterampilan profesional, dan atribut etis.

Pengetahuan teknis mencakup pemahaman tentang prinsip dan standar akuntansi, regulasi, dan prosedur. Ini juga mencakup pemahaman tentang teknologi terbaru dan bagaimana mereka dapat digunakan dalam praktek akuntansi.

Atribut etis mencakup pemahaman tentang standar etika dalam praktek akuntansi dan komitmen untuk bertindak dengan integritas dan profesionalisme. Ini juga mencakup pemahaman tentang isu-isu sosial dan lingkungan, dan bagaimana mereka berdampak pada bisnis dan praktek akuntansi. Sedangkan Udiyanti, Dkk (2014) menyatakan bahwa Kompetensi Staf Akuntansi

merupakan suatu hal yang penting dalam pemerintah untuk mencapai tujuan laporan keuangan pemerintah telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, efektif dan efisien.

2.1.2.4.2 Indikator Kompetensi Staf Akuntansi

Menurut Edison, Anwar, Komariyah (2017:143) menjelaskan bahwa untuk memenuhi unsur kompetensi, seorang staff atau karyawan harus memenuhi unsur-unsur yaitu:

1. Pengetahuan (*Knowledge*)

Memiliki pengetahuan yang didapatkan dari belajar secara formal dan atau dari pelatihan pelatihan atau kursus-kursus yang terkait dengan bidang pekerjaan yang ditanganinya.

2. Keahlian (*Skill*)

Memiliki keahlian terhadap bidang pekerjaan yang ditanganinya dan mampu menanganinya secara detail. Meski demikian, selain ahli, karyawan harus memiliki kemampuan (*ability*) memecahkan masalah dan menyelesaikan dengan cepat dan efisien.

3. Sikap (*Attitude*)

Menjunjung tinggi etika organisasi dan memiliki sikap positif (ramah dan sopan) dalam bertindak. Sikap ini tidak bisa dipisahkan dari tugas seseorang dalam melaksanakan pekerjaan dengan benar, ini merupakan elemn penting bagi usaha jasa atau pelayanan, bahkan memiliki pengaruh terhadap citra perusahaan atau organisasi.

2.1.3 Kualitas Informasi Akuntansi

2.1.3.1 Pengertian Kualitas Informasi Akuntansi

Romney dan Steinbart (2016:12) mengemukakan kualitas informasi akuntansi sebagai berikut “indikasi dari kualitas informasi akuntansi adalah mengurangi ketidakpastian mendukung keputusan, dan mendorong lebih baik dalam hal perencanaan aktivitas kerja. Sedangkan Menurut Cenik, Ardana dan Hendro Lukman (2016 : 5) pengertian kualitas informasi akuntansi adalah suatu rangkaian yang komponen –komponennya saling terkait yang mengumpulkan dan mengambil kembali, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan mengendalikan perusahaan.

2.1.3.2 Indikator Kualitas Informasi Akuntansi

Menurut Rudianto (2012:21) indikator kualitas informasi akuntansi keuangan adalah sebagai berikut:

1. Dapat dipahami

Kualitas informasi penting yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan apabila informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan.

3. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi yang disajikan harus andal. Informasi akan memiliki kualitas yang andal jika bebas dari pengertian menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan, atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

4. Dapat dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi keuangan.

5. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap menurut batasan materialitas dan biaya.

6. Tepat waktu

Agar relevan, informasi dalam laporan keuangan harus dapat memenuhi keputusan ekonomi para penggunanya. Penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Jajang Badruzaman (2014) menunjukkan bahwa penerapan *Good Government Governance* berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi, artinya kualitas informasi akuntansi tidak terlepas dari penerapan *Good Government Governance* itu baik maka kualitas informasi akan semakin baik. Penelitian yang dilakukan oleh Fera Pratiwi Zai, Sahala Purba, dan Arison Nainggolan (2020) menyatakan bahwa penerapan *Good Government Governance* berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Penelitian tersebut, mendukung penelitian ini :

Tabel 2.1

Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Penulis

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
1	Fera Pratiwi Zai, Sahala Purba, dan Arison Nainggolan 2020 Pengaruh Penerapan <i>Good Government Governance</i> dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada BPKAD Kabupaten Nias Barat.	• <i>Good Government Governance</i>	• Kompetensi Sumber Daya Manusia • Kualitas Informasi Laporan Keuangan	Penerapan <i>Good Government Governance</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan, Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Penerapan <i>Good Government Governance</i> Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara simultan Kualitas Informasi Laporan Keuangan.	Jurnal Mutiara Akuntansi Volume 5 No 1 Tahun 2020 Program Studi Akuntansi Universitas Sari Mutiara Indonesia ISSN 2579-7611
2	Wala Siti Nurlaela 2015 Pengaruh <i>Good Government Governance</i> dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas SKPD Kabupaten Ciamis	• <i>Good Government Governance</i>	• Akuntabilitas • Kinerja Instansi Pemerintah	Secara parsial <i>Good Government Governance</i> berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah, dan secara parsial Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Secara Simultan <i>Good Government Governance</i> dan Akuntabilitas berpengaruh bersama-sama terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.	Jurnal Ilmu Pemerintahan 2015 Universitas Komputer Indonesia

- 3 Febrina Lastiar Hutapea dan Aristanti Widyarningsih 2017 Pengaruh *Good Government Governance* dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Pemerintah Provinsi di Indonesia • *Good Government Governance* , Ukuran Legislatif , Kinerja Pemerintah Daerah Secara simultan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari *Good Government Governance* terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan proksi PDRB Per Kapita, secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan dari *Good Government Governance* terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan proksi tingkat kemiskinan, secara simultan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari *Good Government Governance* terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan proksi rasio kemandirian, secara simultan bahwa tidak terdapat dari Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan proksi Tingkat Kemiskinan, secara simultan tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan proksi PPDB Per Kapita, dan secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan dari Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan proksi rasio kemandirian. Jurnal Akuntansi Riset Volume 9 No 1 2017 Program Studi Akuntansi Universitas Pendidikan Indonesia ISSN 2086-2563

4	I Gede Iswara Yudhasena dan IG. A.M Asri Dwija Putri 2019 Pengaruh <i>Good Government Governance</i> , Pengendalian Intern, dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).	• <i>Good Government Governance</i>	• Pengendalian Intern • Budaya Organisasi • Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	<i>Good Government Governance</i> berpengaruh positif terhadap Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem, Pengendalian Intern di OPD berpengaruh positif terhadap Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem, Budaya Organisasi di OPD berpengaruh positif terhadap Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem	E-Jurnal Akuntansi Vol 28.1.Juli 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ISSN 2302-8556
5	Surono 2020 Pengaruh <i>Good Government Governance</i> terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada 19 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur.	• <i>Good Government Governance</i>	• Kinerja Instansi Pemerintah	<i>Good Government Governance</i> berpengaruh positif terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Cianjur	Bidang Akuntansi Vol 7 No 4 2020 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan
6	Fajar Meiyanti, Ichi, Trisandi Eka Putri 2019 Pengaruh Faktor Risiko Kecurangan, <i>Good Government Governance</i> , dan <i>Organizational Citizenship Behavior</i> terhadap Kinerja Organisasi berdasarkan Pendekatan <i>Value For Money</i> pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Subang.	• <i>Good Government Governance</i>	• <i>Organizational Citizenship Behavior</i> • Kinerja Organisasi • <i>Value For Money</i>	Faktor Risiko Kecurangan di Pemerintah Daerah berpengaruh 10egative tidak signifikan terhadap <i>Value For Money</i> , <i>Good Government Governance</i> di Pemerintah Daerah berpengaruh secara positif signifikan terhadap <i>Value For Money</i> , <i>Organizational Citizenship Behavior</i> di Pemerintah Daerah berpengaruh negative tidak signifikan terhadap <i>Value For Money</i> . Secara sim-	Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Vol 1 no 2 Januari 2019 Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja ISSN 2622-2205

ultan menunjukan bahwa secara statistic terbukti Faktor Risiko Kecurangan, *Good Government Governance* dan.

Organizational Citizenship Behavior secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap *Value For Money* di Pemerintah Daerah

7	Jajang Badruzaman 2014 Pengaruh Dukungan Pimpinan dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Penerapan <i>Good Governance</i> serta dampaknya terhadap Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Daerah pada Kantor Kecamatan se Kota Tasikmalaya	• <i>Good Government Governance</i> • Kompetensi Staf Akuntansi • Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Daerah	• Dukungan Pimpinan	Dukungan Pimpinan, Kompetensi Staf Akuntansi pada Kantor Kecamatan Kota Tasikmalaya pada umumnya dan staf akuntansinya memiliki kompetensi yang baik, Informasi Keuangan Daerah di Lingkungan Kantor Kecamatan Kota Tasikmalaya memiliki kualitas yang baik. Dukungan Pimpinan, dan Kompetensi Staf Akuntansi secara total berpengaruh terhadap penerapan <i>Good Governance</i> akan tetapi secara parsial Kompetensi Staf Akuntansi berpengaruh negative terhadap Penerapan <i>Good Governance</i> . Dukungan pimpinan, Kompetensi Staf Akuntansi dan Penerapan <i>Good Governance</i> baik secara parsial maupun simultan berpengaruh positif terhadap Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Daerah.	Jurnal Akuntansi Volume 9 Nomor 1 Januari-Juni 2014 Universitas Siliwangi ISSN 1907-9958
8	Handi Yanuar Lestiawan dan Bambang Jatmiko 2015	• <i>Good Government Governance</i>	• Kinerja Pemerintah Daerah	Hasil penelitian Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat	MAKSIMUM (Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang)

Key Success Factor Good Government Governance serta Pengaruhnya terhadap Kinerja Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

mempunyai pengaruh terhadap Kinerja Pemda namun tidak signifikan

Vol 5 No. 1 2015
Universitas Muhammadiyah
Semarang
ISSN 2580-9482

9	Ni Luh Nyoman Ari Udiyanti, Anantawikrama Tungga Atmadja, dan Nyoman Ari Surya Darma 2014 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Kabupaten Buleleng	Kompetensi Staf Akuntansi	- Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan - Pengendalian Internal - Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Kompetensi Staf Akuntansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, dan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Vol 2 No 1 2014 S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha
10	Iwan Hermansyah dan Rina Marlina 2019 Pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi Dalam Pencapaian Kualitas Informasi Keuangan Daerah pada	Kompetensi Staf Akuntansi	Pencapaian Kualitas Informasi Keuangan Daerah	Hasil penelitian Kompetensi Staf Akuntansi di Lingkungan Kantor Kecamatan Kota Tasikmalaya dapat dikatakan baik, Informasi Keuangan yang dihasilkan oleh Kantor Kecamatan	Jurnal Akuntansi Volume 14 Nomor 2 Juli-Desember 2019 Universitas Siliwangi ISSN 2385-9246

Kantor Keca-
matan Kota
Tasikmalaya.

Kota Tasikmalaya
sudah dapat
dikatakan baik,
Kompetensi Staf
Akuntansi ber-
pengaruh positif
terhadap Kualitas
Informasi Keuangan
Daerah.

11	Putra Mhd Nazrin 2017 Pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Kota Bukittinggi.	Kompe- tensi Staf Akuntansi	• Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan • Pengel-olaan Keuangan Daerah • Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kompetensi Staf Akuntansi ber- pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Bukittinggi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan di Kota Bukittinggi, dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan di Kota Bukittinggi.	Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fekon Vol 4 No. 1 (Februari) 2017 Fakultas Ekonomi Uni- versitas Riau
12	Dariana dan Jonase Oktavia 2018 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kab, Bengkulu	Kompe- tensi Staf Akuntansi	• Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Sistem Pengendalian Internal • Kualitas Laporan Keuangan	Standar Akuntansi Pemerintahan ber- pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Kompetensi Staf Akuntansi ber- pengaruh terhadap Kualitas Kualitas Laporan Keungan.	Jurnal Akuntansi Syariah (JAS) Volume 2 No 1 2018 STIE Syariah Bengkulu ISSN 2657-1676

13	Arizal Pasha 2018 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Kabupaten Grobogan.	• Kompetensi Staf Akuntansi	• Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan • Pengelolaan Keuangan Daerah • Sistem Pengendalian Intern Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Hasil penelitian Penerapan Standar Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan Kompetensi Staf Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	E-Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta 2018
14	Emay, Martian Fajar, dan Adi Suparwo 2019 Dampak Audit Internal, Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada PT Dirgantara Indonesia (Persero)	• Kompetensi Staf Akuntansi	• Audit Internal • Pengendalian Internal • Kualitas Laporan Keuangan	Hasil penelitian Audit Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Kompetensi Staf Akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Secara simultan Audit Internal, Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.	Jurnal Ecodemica Vol 3 NO. 1 April 2019 Universitas BSI ISSN 2549-8932
15	Fibria Anggraini Puji Lestari 2020 Pengaruh Sistem Akuntansi, Kompetensi	• Kompetensi Staf Akuntansi	• Sistem Akuntansi • Internal Control • Kualitas Laporan	Sistem Akuntansi, Kompetensi Staf Akuntansi dan <i>Internal Control</i> berpengaruh positif terhadap Kualitas	Sosio e-kons Volume 12 No. 1 April 2020 Univeritas Indraprasta PGRI ISSN 2085-2266

	Staf Akuntansi, dan <i>Internal Control</i> terhadap Kualitas Laporan Keuangan Perusahaan	Keuangan Perusahaan	Laporan Keuangan Perusahaan	
16	Mardia Rahmi 2013 Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi dan Keahlian Pemakai terhadap Kualitas Informasi Akuntansi pada BUMN di Kota Padang	• Kualitas Informasi Akuntansi	• Penggunaan Teknologi Informasi • Keahlian Pemakai	Penggunaan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Informasi Akuntansi, dan Keahlian Pemakai Berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Informasi Akuntansi Jurnal Akuntansi Vol 1 No 2 2013 Universitas Negeri Padang
17	Ratih Purnamasari 2015 Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Informasi Akuntansi dan Implikasinya pada Kepuasan Pengguna Akhir pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.	• Kualitas Informasi Akuntansi	• Kualitas Sistem Informasi Akuntansi • Kepuasan Pengguna Akhir	Hasil penelitian Kualitas Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Akuntansi, Kualitas Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kepuasan Pengguna Akhir, dan Kualitas Sistem berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Akuntansi dan Implikasinya pada Kepuasan Pengguna Akhir pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten. Jurnal Universitas Komputer Indonesia 2015 Fakultas Ekobomi Universitas Komputer Indonesia

18	Niva Evania 2016 Pengaruh Keahlian Pemakai dan Intensitas Pemakaian terhadap Kualitas Informasi Akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indagiri Hulu.	• Kualitas Informasi Akuntansi	• Keahlian Pemakai • Intensitas Pemakaian	Penggunaan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Akuntansi, Keahlian Pemakai berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Akuntansi, Intensitas Pemakaian tidak berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Akuntansi.	JOM Fekon Vol 3 No 1 (Februari) 2016 Fakultas Ekonomi Universitas Riau
19	Cornelia Jansen, Morasa, Anneke Wangkar 2018 Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi dan Keahlian Pemakai terhadap Kualitas Informasi	• Kualitas Informasi Akuntansi	• Penggunaan Teknologi Informasi • Keahlian Pemakai	Penggunaan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Akuntansi, dan Keahlian Pemakai berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Informasi Akuntansi.	Jurnal Riset Akuntansi Vol 13 No 03 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi
20	Jufri Darma dan Gaffar Hafiz Sagala 2020 Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas	• Kualitas Informasi Akuntansi	• Kualitas Sistem Informasi Akuntansi	Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Akuntansi	Jurnal Ilmiah MEA Vol 4 No 1 2020 Universitas Negeri Medan ISSN 2621-5306
Arkhan Dhiaulhaq Armi (203403151) : Pengaruh Implementasi <i>Good Government Governance</i> dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi (Survey di Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya 2023)					

2.2 Kerangka Pemikiran

Pegertian *Good Government Governance* Menurut Hendra Karianga (2017:40), yaitu: “*Good Governace* Sektor Publik Diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik dengan melibatkan stakeholder terhadap berbagai macam kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan berbagai macam sumber daya

seperti sumber daya alam, keuangan dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi dan transparansi”. Menurut The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) pada tahun 2021, kompetensi staf akuntansi mencakup pengetahuan teknis, keterampilan profesional, dan atribut.

Menurut Edison, Anwar, Komariyah (2017:143) menjelaskan bahwa untuk memenuhi unsur kompetensi, seorang staff atau karyawan harus memenuhi unsur-unsur yaitu Pengetahuan, Keahlian, dan Sikap. Menurut Rudianto (2012:21) indikator kualitas informasi akuntansi keuangan adalah Dapat dipahami, Relevan, dan Tepat waktu.

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah mencerminkan sejauh mana kualitas informasi akuntansi telah tercapai. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK menunjukkan bahwa laporan keuangan telah memenuhi standar yang ditetapkan. Namun, jika terdapat permasalahan seperti ketidaksesuaian dalam pencatatan aset atau pendapatan yang tidak sesuai dengan aturan, ini dapat menyebabkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, maka akan dapat meningkatkan mutu informasi akuntansi. Hal ini sejalan dengan temuan dalam studi sebelumnya yang dilakukan oleh Jajang Badruzaman (2014) yang menunjukkan bahwa penerapan *Good Government Governance* memiliki dampak positif pada kualitas informasi akuntansi. Artinya, mutu informasi akuntansi sangat terkait erat dengan pelaksanaan *Good Government Governance* yang efektif. Studi lain oleh Fera Pratiwi Zai, Sahala Purba, dan Arison Nainggolan (2020) juga menegaskan bahwa

penerapan *Good Government Governance* memiliki dampak positif yang signifikan pada mutu informasi dalam laporan keuangan.

Kompetensi, seperti yang didefinisikan oleh Edison, Anwar, dan Komariyah (2016:142), mengacu pada kemampuan individu untuk melaksanakan tugas dengan benar dan unggul dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Informasi akuntansi yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan harus memiliki mutu yang tinggi. Mutu laporan keuangan juga dipengaruhi oleh tingkat kompetensi para pembuat laporan tersebut, sesuai dengan pandangan Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan, Moermahadi Soerja Djanegara, yang menyatakan bahwa mutu laporan keuangan sangat terkait dengan kompetensi profesional para pembuat laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan juga dapat dipengaruhi oleh ketiadaan regulasi yang mengharuskan para pembuat laporan keuangan memiliki kompetensi di bidang akuntansi.

Menurut Mardiasmo (2018:22) mendefinisikan *Good Governance* adalah “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation's affair at all levels*”. Kutipan ini dapat diartikan bahwa *good governance* lebih menekankan aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan keuangan negara. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) dapat dibuktikan dengan adanya kesesuaian pengelolaan anggaran oleh pemerintah daerah dengan laporan keuangan pemerintah daerah.

Dengan diterapkannya prinsip *good governance* dapat meningkatkan kualitas informasi akuntansi, hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jajang Badruzaman (2014) menunjukkan bahwa penerapan *good government*

governance berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi, artinya kualitas informasi akuntansi tidak terlepas dari penerapan *good government governance* itu baik maka kualitas informasi akan semakin baik. Selain itu juga penelitian yang dilakukan oleh Fera Pratiwi Zai, Sahala Purba, dan Arison Nainggolan (2020) menyatakan bahwa penerapan *good government governance* berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Kompetensi menurut Edison, Anwar, dan Komariyah (2016:142) adalah kemampuan individu untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dan memiliki keunggulan yang didasarkan pada hal-hal yang menyangkut pengetahuan (knowledge), keahlian (skill), dan sikap (attitude).

penelitian yang telah dilakukan oleh Jajang Badruzaman (2014) menunjukan bahwa kompetensi staf akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi yang artinya kualitas informasi akuntansi tidak terlepas dari kualifikasi staf akuntansi jika kualifikasinya baik maka akan mendukung terhadap pembuatan pelaporan.

Selain itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Nyoman Ari Udiyanti, Anantawikrama Tungga Atmadja, dan Nyoman Ari Surya Darmawan (2014), Dariana dan Jonase Oktavia (2018), dan Arizal Kamal Pasha (2018) juga menunjukan bahwa kompetensi staf akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Iwan Hermansyah dan Rina Marlina (2019) dan Putra Mhd Nazrin (2017) menunjukan bahwa Kompetensi Staf Akuntansi berpengaruh positif terhadap Kualitas Informasi Keuangan Daerah.

penelitian yang dilakukan oleh Ilham Syahbana (2019) juga mengemukakan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan secara signifikan terhadap penerapan *good government governance* yang mengindikasikan bahwa semakin besarnya Tingkat kompetensi staff maka semakin efektif staff dalam menerapkan *good government governance*. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Jajang Badruzaman (2014) menekankan pentingnya kompetensi staf akuntansi, terutama seiring dengan tuntutan masyarakat dan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah untuk menyampaikan laporan keuangan yang memenuhi standar. Tanpa adanya staf akuntansi yang memiliki kompetensi yang memadai, akan sulit untuk menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas. Temuan ini mendukung ide bahwa kompetensi staf akuntansi berdampak positif pada mutu informasi akuntansi.

Studi-studi lain yang dilakukan oleh Ni Luh Nyoman Ari Udiyanti, Anantawikrama Tungga Atmadja, dan Nyoman Ari Surya Darmawan (2014), Dariana dan Jonase Oktavia (2018), serta Arizal Kamal Pasha (2018) juga menunjukkan bahwa kompetensi staf akuntansi berpengaruh positif dan signifikan pada mutu laporan keuangan. Demikian pula, penelitian oleh Iwan Hermansyah dan Rina Marliana (2019) serta Putra Mhd Nazrin (2017) menunjukkan bahwa kompetensi staf akuntansi berdampak positif pada mutu informasi keuangan daerah.

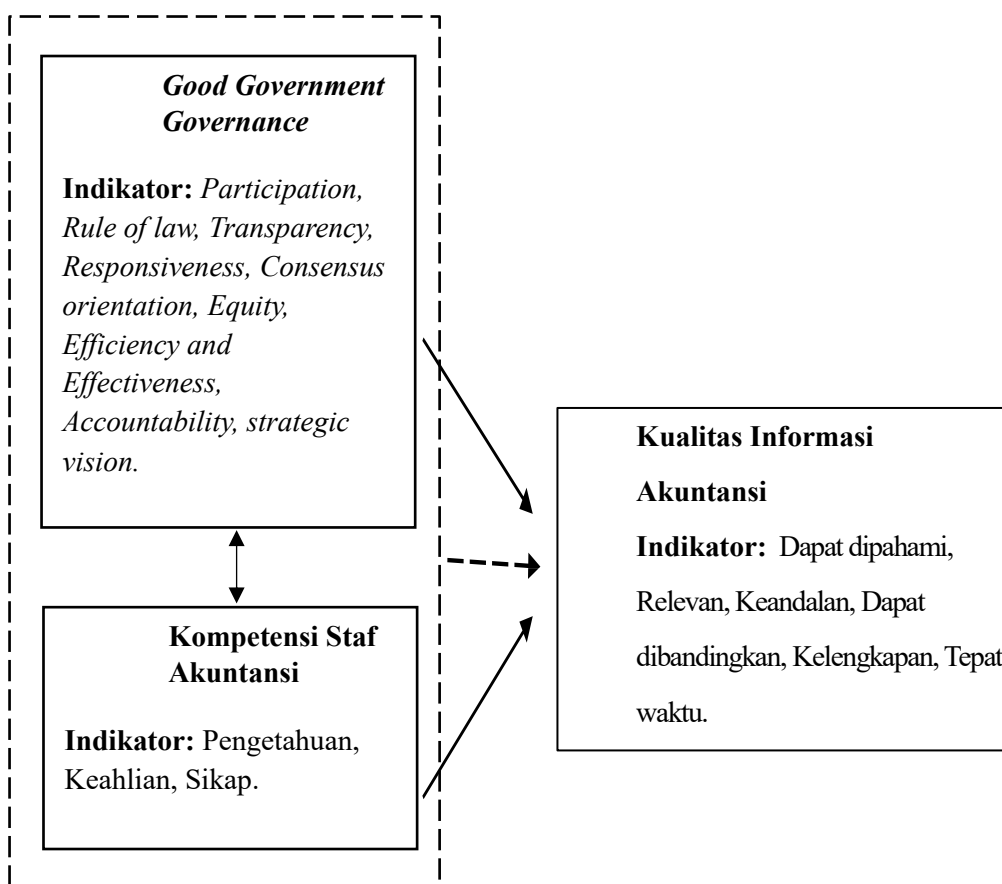
Pelaksanaan *Good Government Governance* dapat berjalan dengan lebih efektif jika didukung oleh tingkat kompetensi staf yang tinggi. Pandangan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ria Herlina, Taufeni Taufik, dan Azwir Nasir (2021), yang mengidentifikasi kompetensi sebagai salah satu faktor yang memengaruhi akuntabilitas, yang merupakan indikator penting dari pelaksanaan *Good*

Government Governance. Kompetensi, yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan perilaku, diperlukan oleh setiap staff ASN agar dapat menjalankan tugas mereka secara efektif sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020. Staff ASN yang memiliki kompetensi yang baik diharapkan dapat mencegah tindakan korupsi yang merugikan daerah dan negara. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Leny Nofianti dan Anggrieta Denziana (2012), yang menegaskan bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah berpengaruh signifikan pada pelaksanaan *Good Government Governance*, serta penelitian oleh Ilham Syahbana Limbong (2019), yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kompetensi staff, semakin efektif mereka dalam melaksanakan *Good Government Governance*. Namun, studi oleh Jajang Badruzaman (2014) menyatakan bahwa kompetensi staf akuntansi memiliki dampak negatif secara parsial pada pelaksanaan *Good Government Governance*, yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan *Good Government Governance* dapat berjalan baik jika staf akuntansi tidak memiliki tingkat kompetensi yang tinggi. Sebaik apapun suatu sistem akan sia-sia begitu saja, apabila tidak didukung kualitas SDM yang memadai, khususnya kualitas pribadi SDM yang terdiri dari potensi pendidikan, pengalaman, dan pelatihan (Indriasih, 2014).

Stewardship Theory menjadi *Grand* teori dalam penelitian ini. Menurut Firdaus Abdul Rahman (2016) *Stewardship Theory* (Teori Penatagunaan) menyatakan bahwa *Stewardship Theory* adalah salah satu pandangan tentang cara mengelola organisasi dan personel-personel yang terkait didalamnya dengan pendekatan yang dikembangkan yaitu kebersamaan (*collectivity*), kemitraan, pemberdayaan (*empowerment*), saling percaya dan pelayanan. Menurut Donaldson dan Davis (1991):

“*Stewardship theory* merupakan sebuah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Implikasi *stewardship theory* terhadap penelitian ini, dapat dilihat dari eksistensi organisasi sektor publik yang ada di kecamatan Mangkubumi dipercaya masyarakat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat, adil dan bertanggung jawab sesuai dengan kepentingan publik guna mencapai tujuan organisasi yaitu keberhasilan ekonomi, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Dilihat dari sisi hubungan *Stewardship Theory* dalam penelitian, peneliti menghubungkan organisasi sektor publik sebagai pihak yang diberikan kepercayaan yaitu *Steward* dan masyarakat sebagai *Principal*. Pemerintah sebagai pihak yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat dituntut untuk profesional dalam menjalankan organisasi. Maka diperlukan kinerja organisasi yang baik dan bertindak sesuai dengan kepentingan publik untuk melakukan tugas dan fungsinya. Sehingga kesuksesan organisasi dapat tercapai apabila kinerja organisasi berjalan efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada publik. Pelaksanaan kinerja organisasi sesuai dengan pendekatan *Stewardship Theory* khususnya (*collectivity*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pelayanan. Mengacu pada *Stewardship Theory* juga menjelaskan bahwa faktor intrinsik memotivasi dalam pelayanan organisasi dan dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi. Hal ini selaras dengan variabel independen pada penelitian ialah *Good Governance Governance* dan staff akuntansi diharapkan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kinerja di kantor kecamatan Mangkubumi. Berdasarkan kerangka pemikiran ini dan temuan-temuan penelitian terdahulu, penulis mengusulkan penelitian dengan judul "Pengaruh Implementasi *Good Government Governance* dan Kompetensi Staf Akuntansi

terhadap Kualitas Informasi Akuntansi." Dalam penelitian ini, peneliti akan lebih mendalami untuk memahami hubungan antara implementasi *Good Government Governance*, kompetensi staf akuntansi, dan mutu informasi akuntansi dalam konteks pengelolaan keuangan publik. Maka dari itu hubungan antar variabel dapat dijelaskan dengan skema sebagai berikut :



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

---> : Simultan

—> : Parsial

2.3 Hipotesis

Menurut Creswell (2020), hipotesis adalah "prediksi yang diuji, di mana peneliti membuat perkiraan tentang hasil penelitian"

Berdasarkan kerangka penelitian teoritis, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Implementasi *Good Government Governance* berpengaruh terhadap kompetensi staff akuntansi.
2. Implementasi *Good Government Governance* dan Kompetensi Staf Akuntansi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Informasi Akuntansi.
3. Implementasi *Good Government Governance* dan Kompetensi Staf Akuntansi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Informasi Akuntansi.